

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Agar keadaan sehat tersebut dapat terwujud maka diperlukan pengelolaan kesehatan, salah satunya melalui administrasi kesehatan.⁽¹⁾

Administrator Kesehatan adalah tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan memiliki ijazah/gelar dan mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang aministrasi kesehatan. Administrator kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.⁽²⁾

Kriteria untuk menjadi tenaga administrator kesehatan selain harus memiliki ijazah minimal S1/D4 Kesehatan, pangkat minimal penata muda/Gol IIIa, dan juga harus mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat. Administrator Kesehatan memiliki jenjang jabatan yaitu Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Administrator Kesehatan Ahli Muda, dan Administrator Kesehatan Ahli Madya dan setiap jenjang jabatan memiliki rincian kegiatan masing-masing.⁽²⁾

Tuntutan terhadap kebutuhan Administrator Kesehatan terhadap pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang cenderung menuntut pelayanan yang lebih baik, lebih ramah, dan lebih bermutu

termasuk dalam pelayanan kesehatan.⁽³⁾ Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat, maka jumlah tenaga administrator kesehatan yang memadai juga dibutuhkan agar masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Upaya pemerintah dalam mencukupi kebutuhan administrator kesehatan dalam rangka pencapaian pembangunan di bidang kesehatan dan peningkatan mutu pelaksanaan program-program kesehatan adalah menetapkan jabatan fungsional administrator kesehatan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya. Namun demikian, upaya pemenuhan administrator kesehatan ini masih ditemukan *gap* salah satunya pada ketersediaan jumlah administrator kesehatan sehingga diperlukan upaya-upaya pemenuhan seperti perencanaan dan investasi yang memadai (*adequate*) dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Indonesia.⁽⁴⁾

Kurangnya jumlah tenaga administrator kesehatan di suatu institusi kesehatan dapat mempengaruhi kegiatan dalam melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi berbagai program pembangunan kesehatan, sehingga tidak akan berjalan dengan lancar dan baik upaya-upaya dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Institusi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data Renbut terdapat *gap* antara ketersediaan dan kebutuhan tenaga Adminkes di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar sebesar 68.09%. Gap tersebut merupakan kekurangan tenaga adminkes secara keseluruhan berdasarkan usulan rencana kebutuhan. Berdasarkan data dari SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 060 – 489 – 2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 juga diperoleh terdapat *gap* antara ketersediaan dan

kebutuhan tenaga Adminkes di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar sebesar 42.31%. *Gap* tersebut merupakan kekurangan dari tenaga adminkes secara umum, sedangkan untuk rincian kebutuhan pada setiap jenis adminkesnya yaitu adminkes pertama kebutuhannya 8 orang, adminkes muda kebutuhannya sebanyak 11 orang, adminkes madya kebutuhannya sebanyak 7 orang. Pada adminkes muda terdapat *gap* kekurangan sebesar 45,45%.

Mengatasi masalah kekurangan tenaga Administrator Kesehatan, maka diperlukan perencanaan penambahan jumlah tenaga SDM Kesehatan. Kebutuhan jumlah tenaga kesehatan termasuk tenaga Administartor Kesehatan dapat diketahui dengan metode *Workload Indicators of Staffing Need method* (metode WISN) dan *work sampling*. Melalui metode WISN akan didapatkan hasil berupa data beban kerja, data jumlah kebutuhan SDM berdasarkan kegiatan pokok pada ketegori SDM tersebut. Melalui metode *work sampling* akan diketahui beban kerja berdasarkan pengamatan pada sekelompok orang secara sistematis pada suatu unit kerja tertentu.⁽⁵⁾

Sehubungan terkait dengan Kebutuhan Adminkes terdapat dalam penelitian Fadilla Azmi tentang Analisis Beban Kerja Tenaga Administrator Kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan jumlah tenaga administrator kesehatan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang sebanyak 12 orang, berdasarkan perhitungan WISN tenaga administrator kesehatan yang dibutuhkan sebanyak 23 orang sehingga terdapat kekurangan tenaga Administrator Kesehatan sebanyak 11 orang.⁽⁶⁾

Administrator Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merupakan tenaga yang tersebar di berbagai bidang dan seksi. Berdasarkan survei awal, diperoleh jumlah Administrator Kesehatan (adminkes) sebanyak 15 orang.

Adapun rincian ketersediaannya yaitu adminkes ahli pertama sebanyak 5 orang, adminkes ahli muda sebanyak 6 orang, dan adminkes ahli madya sebanyak 4 orang. Pada adminkes ahli muda terdiri dari 5 orang melalui UKOM dan diklat sedangkan 1 orang lagi melalui penyederhanaan birokrasi. Tugas pokok dan rician kegiatan seorang Adminkes di Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar mengacu kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya dan untuk butir kegiatannya juga terdapat dalam anjab pada bidang dan seksi masing-masing.

Hasil wawancara awal dengan tenaga Adminkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar diketahui bahwa dengan ketersediaan tenaga adminkes yang kurang menyebabkan beban kerja adminkes menjadi tinggi. Akibatnya kegiatan yang dilakukan tidak optimal dan maksimal sehingga output yang di dapatkan juga tidak mencapai 100%.

Terdapatnya kekurangan tenaga adminkes, selain beban kerja yang tinggi maka tidak akan berjalan dengan baik upaya untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi, dan sertifikasi berbagai program pembangunan kesehatan. Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Kebutuhan Tenaga Administrator Kesehatan Dengan Metode WISN di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebutuhan Tenaga Administrator Kesehatan dengan Metode *Workload Indicators Of Staffing Need* (WISN) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Diketuainya Kebutuhan Tenaga Administrator Kesehatan dengan Metode *Workload Indicator Of Staffing Need* (WISN) di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Diketuainya uraian tugas pokok tenaga adminkes ahli muda yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Diketuainya tentang karakteristik tenaga adminkes dan penggunaan sarana yang tersedia di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Diketuainya kegiatan (produktif langsung, produktif tidak langsung, non produktif, dan pribadi) tenaga adminkes ahli muda yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Diketuainya waktu kerja tenaga adminkes ahli muda yang tersedia di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
5. Diketuainya standar beban kerja tenaga adminkes ahli muda yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
6. Diketuainya standar kelonggaran tenaga adminkes ahli muda yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
7. Diketuainya jumlah kebutuhan tenaga adminkes ahli muda yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
8. Diketuainya metode dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga adminkes ahli muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
9. Diketuainya hambatan/kendala dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga adminkes ahli muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

10. Diketuinya tindak lanjut dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan tenaga adminkes ahli muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan tentang masalah sumber daya manusia khususnya berkaitan dengan kebutuhan tenaga adminkes ahli muda berdasarkan beban kerja, sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi perencanaan dan perhitungan adminkes di Dinas Kesehatan.
2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat, hasil dapat dijadikan bahan masukan dan tambahan studi kepustakaan bagi penelitian selanjutnya di masa yang akan datang apabila akan dilakukan penelitian terkait dengan topik sejenis.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai gambaran beban kerja dan jumlah kebutuhan SDM (Adminkes) di Dinas Kesehatan serta melalui penelitian ini peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.
4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai informasi, bahan bacaan, sumber referensi, serta dapat menambah wawasan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebutuhan tenaga administrator kesehatan (adminkes) ahli muda berdasarkan beban kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran penelitian adalah tenaga fungsional administrator kesehatan ahli muda yang telah mengikuti diklat dan UKOM. Penelitian dilakukan dengan melakukan telaah dokumen, formulir *work sampling* dan WISN serta melalui wawancara mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada bulan Maret-Juli tahun 2023.